































































































- teori-teori ilmiah
4. Kriteria evaluasi juga dapat dibuat dengan mengacu pada hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan atau diseminarkan.
  5. Kriteria merupakan *expert judgement*, yakni kriteria yang ditetapkan oleh ahli-ahli di bidang mereka.
  6. Tim evaluator yang beranggotakan beberapa orang dapat pula menyusun kriteria evaluasi secara bersama-sama sehingga kriteria ini merupakan kesepakatan tim
  7. Evaluator juga bisa membuat kriteria evaluasi sendiri dengan langkah-langkah perbaikan.

### **2.3.3. Model-Model Evaluasi Program**

Isaac dalam Jaedun (2010) membedakan model evaluasi program berdasarkan orientasinya yaitu

1. Model yang berorientasi pada tujuan (*goal-oriented*)
2. Model yang berorientasi pada keputusan (*decision oriented*)
3. Model yang berorientasi pada kegiatan dan orang-orang yang menanganinya
4. Model yang berorientasi pada pengaruh dan dampak program

Lebih lanjut, Jaedun (2010) juga menyatakan bahwa beberapa ahli membedakan model evaluasi menjadi 8 model yaitu

1. ***Goal Oriented Evaluation Model*** yang dikembangkan oleh Tyler  
Model evaluasi yang berorientasi pada tujuan ini merupakan model yang muncul paling awal. Yang menjadi objek pengamatan pada model ini adalah tujuan dari program yang sudah ditetapkan

sebelum program tersebut dimulai. Evaluasi ini dilakukan secara berkesinambungan, terus-menerus, untuk mengevaluasi seberapa jauh tujuan tersebut telah tercapai dalam proses pelaksanaan program.

2. **Goal Free Evaluation Model** yang dikembangkan oleh Scriven

Model evaluasi bebas tujuan ini dapat dikatakan berlawanan dengan model yang pertama. Jika pada model pertama, evaluator secara terus-menerus memantau tingkat pencapaian tujuan, maka dalam goal free evaluation evaluator justru seolah-olah berpaling dari tujuan. Menurut Scriven, dalam melaksanakan evaluasi, evaluator tidak harus hanya terpaku pada tujuan program, tetapi mereka justru harus mengidentifikasi dampak program, baik dampak yang positif (hal-hal yang diharapkan) maupun dampak yang negatif (hal-hal yang tidak diharapkan).

3. **Formatif Sumatif Evaluation Model** yang dikembangkan oleh Scriven

Model yang dikembangkan oleh Scriven ini menunjuk adanya tahapan dan lingkup objek yang dievaluasi, yaitu evaluasi yang dilakukan pada waktu program tersebut masih berjalan (yang disebut evaluasi formatif), dan evaluasi yang dilakukan pada saat program tersebut telah usai (yang disebut evaluasi sumatif). Evaluasi formatif atau evaluasi yang dilakukan pada saat program tersebut berjalan, dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh program yang telah dirancang tersebut telah berjalan, dan sekaligus untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi secara dini

sehingga dapat melakukan perbaikan-perbaikan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program. Sementara itu, evaluasi sumatif atau evaluasi yang dilakukan pada saat program tersebut berakhir, dimaksudkan untuk mengukur ketercapaian tujuan program.

4. **Countenance Evaluation Model** yang dikembangkan oleh Stake.

Model yang dikembangkan oleh Stake ini menurut Fernandes (1984) menekankan pada pelaksanaan dua komponen pokok, yaitu: a) deskripsi (*description*), dan b) pertimbangan (*judgments*), serta membagi objek evaluasi ke dalam tiga hal, yaitu: 1) anteseden (evaluasi terhadap konteks); 2) transaksi (evaluasi terhadap proses); dan 3) luaran (evaluasi terhadap output dan outcomes).

5. **Responsive Evaluation Model** yang dikembangkan oleh Stake.

Model *responsive evaluation* merupakan model evaluasi yang menggunakan pendekatan *client-centered studies* dan *transaction observation*. Model ini dikembangkan oleh Robert Stake dan cocok digunakan untuk mengevaluasi program yang banyak menimbulkan konflik di masyarakat. Keputusan evaluasi berorientasi kepada klien atau pengguna program.

6. **CSE-UCLA Evaluation Model** yang menekankan pada “kapan” evaluasi dilakukan.

CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSE dan UCLA. CSE merupakan singkatan dari *Center for the Study of Evaluation*, sedangkan UCLA merupakan singkatan dari *University of California in Los Angeles*. Ciri dari model CSE-UCLA

adalah adanya lima tahapan evaluasi, yaitu perencanaan, pengembangan, implementasi, hasil dan dampak.

7. **CIPP Evaluation Model** yang dikembangkan oleh Stufflebeam.

Model CIPP dikembangkan oleh Stufflebeam dkk pada tahun 1967, yang merupakan singkatan dari:

C : *Context evaluation* (evaluasi terhadap konteks)

I : *Input evaluation* (evaluasi terhadap masukan)

P : *Process evaluation* (evaluasi terhadap proses)

P : *Product evaluation* (evaluasi terhadap hasil)

Keempat kata yaitu CIPP tersebut pada dasarnya merupakan sasaran evaluasi, yang tidak lain adalah komponen dari suatu program. Dengan kata lain, model CIPP adalah model evaluasi yang memandang program yang dievaluasi sebagai suatu sistem. Meskipun model CIPP ini merupakan model yang memiliki komponen yang cukup lengkap, namun model CIPP hanya berhenti pada pengukuran *output (product)*. Oleh karena itu, model CIPP ini telah banyak dikembangkan dengan menambah komponen *Outcomes* sehingga model tersebut menjadi CIPPO.

8. **Discrepancy Model** yang dikembangkan oleh Provus.

Model yang dikembangkan oleh Malcom Provus ini merupakan model evaluasi yang mengorientasikan pada adanya kesenjangan di dalam pelaksanaan program. Evaluasi yang dilakukan oleh evaluator dilakukan dengan mengukur besarnya kesenjangan yang terjadi pada

setiap komponen program. Dalam hal ini, evaluator mengukur adanya perbedaan (kesenjangan) antara yang seharusnya dicapai (berdasarkan tujuan program) dengan realitas hasil yang dapat dicapai.

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Wirawan (2011) menyatakan bahwa terdapat berbagai model evaluasi program yaitu: 1) model evaluasi berbasis tujuan; 2) model evaluasi bebas tujuan; 3) model evaluasi formatif dan sumatif; 4) model evaluasi formatif dan sumatif; 5) model evaluasi responsive; 6) model evaluasi CIPP; 7) model evaluasi adversary; 8) model evaluasi ketimpangan; 9) model evaluasi sistem analisis; 10) model evaluasi benchmarking; 11) model evaluasi kotak hitam; 12) model evaluasi konosurship dan kritikisme; 13) model evaluasi terfokus utilisasi; 14) akreditasi; 15) theory driven evaluation model; serta 16) model evaluasi semu.

#### **2.3.4. Model Evaluasi CIPP**

##### **2.3.4.1. Pengertian Model Evaluasi CIPP**

Yahaya (2001) menyatakan bahwa model CIPP ditemukan pada akhir tahun 60-an untuk memenuhi permintaan evaluasi yang berorientasi pada tujuan. Dalam konsep penilaian yang dijelaskan oleh Stufflebeam bahwa penilaian seharusnya dengan pengumpulan informasi sains untuk menentukan hasil. Tugas dari evaluator adalah mengumpulkan data (*collect data*), merencanakan (*planning*), menganalisis (*analyses*),

mempersiapkan informasi untuk memilih tindakan alternatif (*prepare information to choose the alternative action*), dan melaporkan (*report*). Tindakan ini dapat dilakukan dengan 4 bagian yakni hasil dari lingkungan/*environment* (*context*), pelaksanaan/*implementation* (*process*) dan hasil dari masukan/input (*product*) sehingga modelnya disebut sebagai *Context-Input-Process-Product* (CIPP). Lebih lanjut, Sudjana & Ibrahim (2004) menyatakan bahwa makna dari masing-masing dimensi adalah sebagai berikut 1) *Context* merupakan situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi yang akan dikembangkan dalam sistem yang bersangkutan; 2) *Input* merupakan sarana/modal/bahan dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan; 3) *Process* merupakan pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana/modal/ bahan di dalam kegiatan nyata di lapangan; dan 4) *Product* merupakan hasil yang dicapai baik selama maupun pada akhir pengembangan system yang bersangkutan.

Mahmudi (2011) menyatakan bahwa CIPP merupakan sebuah model evaluasi yang menggunakan pendekatan yang berorientasi pada manajemen (*management-oriented evaluation approach*) atau disebut sebagai bentuk evaluasi manajemen program (*evaluation in program management*). Model CIPP berpijak pada pandangan bahwa tujuan terpenting dari evaluasi



program bukanlah membuktikan (*to prove*), melainkan meningkatkan (*to improve*). Oleh karena itu, model ini juga dikategorikan dalam pendekatan evaluasi yang berorientasi pada peningkatan program (*improvement-oriented evaluation*), atau bentuk evaluasi pengembangan (*evaluation for development*). Artinya, model CIPP diterapkan dalam rangka mendukung pengembangan organisasi dan membantu pemimpin dan staf organisasi tersebut mendapatkan dan menggunakan masukan secara sistematis supaya lebih mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting atau, minimal, bekerja sebaik-baiknya dengan sumber daya yang ada.

#### **2.3.4.2. Kelebihan dan Kelemahan Model Evaluasi CIPP**

Model evaluasi CIPP mempunyai kelebihan dan kelemahan. Adapun Mahmudi (2011) menyatakan bahwa kelebihan Model CIPP adalah

1. Evaluator dapat melakukan evaluasi ketika program belum dimulai dan selama program berlangsung
2. Model CIPP ditujukan untuk melayani kebutuhan orang-orang yang merencanakan dan melaksanakan program
3. Keputusan dalam Model CIPP berupa penilaian apakah kebutuhan-kebutuhan sasaran program sudah atau belum terpenuhi.
4. Model CIPP mencakup evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif atau

proaktif dimaksudkan untuk mengambil keputusan, sedangkan evaluasi sumatif atau retroaktif terutama untuk memberikan informasi tentang akuntabilitas. Evaluasi konteks, input, proses, dan produk dapat dipraktikkan dalam rangka pengambilan keputusan (peran formatif) dan penyajian informasi mengenai akuntabilitas (peran sumatif).

Selain kelebihan, Model CIPP juga mempunyai kelemahan yaitu

1. Karena terfokus pada informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan dan stafnya, evaluator boleh jadi tidak responsif terhadap masalah-masalah atau isu-isu yang signifikan
2. Hasil evaluasi ditunjukkan kepada para pemimpin tingkat atas (top management), sehingga model ini bisa jadi tidak adil dan tidak demokratis
3. Model CIPP itu kompleks dan memerlukan banyak dana, waktu, dan sumber daya lainnya

#### **2.3.4.3. Unsur Model Evaluasi CIPP**

Mahmudi (2011) juga menyatakan bahwa terdapat empat unsur yang berkesinambungan.

1. Evaluasi konteks utamanya mengarah pada identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dan pada pemberian masukan untuk memperbaiki organisasi. Tujuan pokok dari evaluasi konteks adalah menilai seluruh keadaan organisasi, mengidentifikasi kelemahannya, menginventarisasi kekuatannya yang bisa dimanfaatkan untuk menutupi

kelemahannya, mendiagnosis masalah-masalah yang dihadapi organisasi, dan mencari solusi-solusinya. Evaluasi konteks juga bertujuan untuk menilai apakah tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang menjadi sasaran organisasi.

2. Evaluasi input istimewa dimaksudkan untuk membantu menentukan program guna melakukan perubahan-perubahan yang dibutuhkan. Evaluasi input mencari hambatan dan potensi sumber daya yang tersedia. Tujuan utamanya ialah membantu klien mengkaji alternatif-alternatif yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi dan sasaran organisasi. Dengan kata lain, evaluasi input berfungsi untuk membantu klien menghindari inovasi-inovasi yang sia-sia dan diperkirakan akan gagal atau sekurang-kurangnya menghambur-hamburkan sumber daya.
3. Evaluasi proses pada dasarnya memeriksa pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan masukan bagi pengelola atau manajer dan stafnya tentang kesesuaian antara pelaksanaan rencana dan jadwal yang sudah dibuat sebelumnya dan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada. Apabila rencana tersebut perlu dimodifikasi atau dikembangkan, evaluasi proses memberikan petunjuknya. Masih ada tujuan-tujuan lain yang patut diperhatikan, yakni menilai secara periodik seberapa jauh penerimaan para partisipan program dan keberhasilan mereka dalam melaksanakan peran-peran mereka; dan memberikan catatan yang

lengkap tentang pelaksanaan rencana dan perbandingannya dengan tujuan awalnya. Evaluasi proses dapat meninjau kembali rencana organisasi dan evaluasi-evaluasi terdahulu untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting dari organisasi yang harus dimonitor. Di sini yang mesti diingat adalah bahwa evaluasi proses terutama bertujuan untuk memastikan prosesnya. Penyimpangan-penyimpangan dari rencana semula dijelaskan. Fungsi utama dari evaluasi proses ialah memberikan masukan yang dapat membantu staf organisasi menjalankan program sesuai dengan rencana, atau mungkin memodifikasi rencana yang ternyata buruk. Pada gilirannya, evaluasi proses menjadi sumber informasi yang vital untuk menafsirkan hasil-hasil evaluasi produk.

4. Evaluasi produk bertujuan untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai capaian-capaian program. Lebih jelasnya, evaluasi produk bertujuan untuk menilai keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan sasaran program. Penilaian-penilaian tentang keberhasilan program atau organisasi ini dikumpulkan dari orang-orang yang terlibat secara individual atau kolektif, dan kemudian dianalisis. Artinya, keberhasilan atau kegagalan program dianalisis dari berbagai sudut pandang.

Langkahnya dapat diawali dengan menilai kinerja organisasi berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang telah didiagnosis sebelumnya. Berikutnya, evaluasi produk juga memeriksa dampak-dampak program, baik yang sesuai

dengan tujuan dan maksud program maupun tidak, yang positif maupun negatif. Evaluasi produk kerap kali diperluas dengan menilai dampak-dampak jangka panjang dari program. Fungsi akhirnya adalah menentukan apakah program atau organisasi perlu dilanjutkan, diulang, dan/atau dikembangkan di tempat-tempat lain, atau sebaliknya dihentikan. Empat jenis evaluasi tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini

Keempat unsur dalam model evaluasi CIPP secara lebih lengkap dijelaskan dalam tabel berikut

**Tabel 2.1. Evaluasi CIPP**

	<b>Evaluasi Context</b>	<b>Evaluasi Input</b>	<b>Evaluasi Proses</b>	<b>Evaluasi Produk</b>
Tujuan	Menentukan konteks organisasi, mengidentifikasi sasaran program dan menilai kebutuhan-kebutuhan mereka, mengidentifikasi peluang untuk memenuhi kebutuhan mereka, mendiagnosis masalah-masalah yang melatari kebutuhan itu, dan menilai apakah tujuan	Mengidentifikasi dan menilai kemampuan sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk menerapkan strategi, budget, dan jadwal program.	Mengidentifikasi atau memprediksi, selama proses berlangsung, kesalahan-kesalahan desain prosedur atau pelaksanaannya; memberikan informasi untuk mengambil keputusan yang belum diprogramkan; dan mencatat dan menilai peristiwa-peristiwa dan aktivitas-	Mengumpulkan deskripsi dan penilaian tentang hasil-hasil program; mengaitkan mereka dengan tujuan, konteks, input, dan proses; dan menafsirkan keberhargaan dan manfaat program.

	yang sudah ditetapkan cukup responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan yang telah dinilai itu.		aktivitas prosedural.	
Metode	Analisis sistem, survai, analisis dokumen, hearing, wawancara, tes diagnostik, dan teknik Delphi.	Menginventarisasi dan menganalisis SDM dan sumber daya materi, strategi solusi, fisibilitas & keuangan; dan metode-metode lain seperti kajian pustaka, melihat langsung programnya, membentuk tim peninjau, memakai tes.	Memonitor potensi hambatan prosedural dan mewaspadaai hambatan yang tak terduga, mencari informasi khusus tentang keputusan yang telah diprogramkan, mendeskripsikan proses yang sebenarnya, dan berinteraksi dengan staf dan mengamati aktivitas mereka.	Menentukan dan mengukur kriteria hasil; mengumpulkan penilaian-penilaian terhadap hasil dari pihak-pihak yang terlibat dalam program; & menganalisis secara kualitatif dan kuantitatif.
Kaitannya dengan pengambilan keputusan untuk mengubah pros	Untuk mengambil keputusan tentang pihak-pihak yang menjadi sasaran program, tentang tujuan program dalam hubungannya dengan pemenuhan kebutuhan atau pemanfaatan peluang, & tentang tujuan dalam kaitannya dengan pemecahan masalah, misalnya	Untuk memilih sumber pendukung, strategi solusi & desain prosedur, misalnya untuk melakukan perubahan-perubahan secara tertata; dan memberikan dasar untuk menilai pelaksanaan program.	Untuk melaksanakan dan menyempurnakan desain dan prosedur program, misalnya untuk mengawasi proses; & memberikan catatan tentang proses yang sebenarnya untuk menafsirkan hasil-hasil program.	Untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, menghentikan, memodifikasi program, atau memfokuskan ulang pada perubahan; & memberikan catatan yang jelas tentang dampaknya (yang sesuai dengan maksud & tujuan awal atau tidak, yang



esnya	untuk merencanakan perubahan; & memberikan dasar untuk menilai hasil program.			positif atau negatif).
-------	---	--	--	------------------------

#### 2.4. Efektivitas

Weiss (1973) dalam Sugiono (2013 :741) mengatakan bahwa pada dasarnya Evaluasi Program adalah menguji Efektivitas suatu Program. Efektivitas adalah kemampuan memproduksi hasil yang diinginkan. Sesuatu dikatakan efektif ketika berhasil mencapai hasil yang diinginkan atau diharapkan, serta memberikan dampak yang jelas. Secara etimologis kata "efektif" berasal dari kata Latin effectivus, yang berarti kreatif, produktif dan efektif. Kata Ini muncul dalam bahasa Inggris Tengah antara 1300-1400 Masehi. Mihaiu, et al (2010) menyatakan "Efektivitas adalah indikator yang digunakan untuk mengukur rasio hasil yang diperoleh dengan yang terprogram". Peter Drucker (2001 P.147 ) yakin bahwa tidak ada efisiensi tanpa efektivitas, karena lebih penting untuk melakukan dengan baik apa yang telah dijadikan tujuan dalam program (efektivitas) daripada melakukan sesuatu yang tidak terprogram dengan efisien. Dengan kata lain bahwa efektivitas adalah kondisi yang diperlukan (pra-kondisi) untuk mencapai efisiensi. Jika efisiensi dipengaruhi oleh faktor input berupa sumber

daya (dalam sector publik jauh lebih sulit diukur karena memiliki dua dimensi yaitu ekonomi dan sosial) dan output. Maka efektivitas tergantung pada faktor output, hasil dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti gaya hidup dan pengaruh sosial-ekonomi memberikan pengaruh besar atas efektifitas.

Kualitas administrasi merupakan faktor berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi. Korupsi adalah faktor eksternal lain yang mempengaruhi faktor Kebijakan Publik. Efek tersebut ditutupi oleh dampak output dari kebijakan publik yang sulit diukur. Butuh kajian lebih jauh untuk mengukur output dalam kebijakan publik karena beberapa dampak sosial-ekonomi baru bisa dirasakan beberapa tahun kedepan (Mihaiu, et all, 2010 P.135). Kinerja sektor publik menyiratkan hubungan antara tujuan, sarana dan hasil, sehingga merupakan resultan efektivitas, efisiensi dan anggaran yang ideal. Efektivitas diukur dengan menggunakan rasio hasil yang real pada tingkat yang diharapkan. Proses pengukuran efektifitas kebijakan publik mempunyai beberapa kendala terkait nilai dan kuantitas hasil yang sering memiliki bentuk non fisik.

Indikator efektivitas kinerja program didasarkan pada langkah-langkah yang telah disepakati, akses, kesesuaian, dan kualitas dengan tujuan untuk merefleksikan sejauh mana tujuan dari suatu kebijakan



pemerintah telah tercapai. Indikator pada umumnya difokuskan pada upaya mengukur perubahan hasil yang menjadi tujuan dari program, namun hasil juga tergantung pada pengaruh eksternal. Hasil pada setiap tahapan sering tidak memberikan informasi adanya hubungan kausalitas dengan input. Para ekonom menerapkan konsep Kontra faktual untuk menentukan kondisi apa yang terjadi dengan atau tanpa sebuah program/kebijakan. Perubahan harus diukur dengan perubahan hasil relatif terhadap kontrafaktual tersebut. Metode ini biasanya membutuhkan target yang ditetapkan yang menyiratkan harapan perbaikan pada apa yang diasumsikan akan terjadi (Productivity Commission, 2013 P. 6)

## **2.5 Pembiayaan Pendidikan**

Pembiayaan pendidikan menurut Mulyono (2010:81) diartikan sebagai berikut:

Biaya merupakan suatu unsur yang menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu organisasi yang akan mencapai suatu tujuan tertentu. Kegiatan yang dilaksanakan dengan biaya yang rendah dan hasilnya mempunyai kualitas yang baik dapat dikatakan kegiatan tersebut dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Biaya pendidikan merupakan komponen bagian yang sangat membantu dalam penyelenggaraan pendidikan supaya setiap pencapaian tujuan pendidikan baik tujuan yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif bisa tercapai.

## **2.6 Hasil Penelitian Relevan**

Hasil penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Asankha dan Takashi (2011) tentang Pendidikan Menengah Universal, dijelaskan bahwa pemerintah Uganda memperkenalkan Pendidikan Menengah Universal (USE) untuk meningkatkan angka partisipasi pada tahun 2007. Fokus dari penelitian mereka adalah mengevaluasi dampak dari kebijakan USE pada pendaftaran dengan menggunakan panel rumah tangga. Asankha dan Takashi menemukan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam pendaftaran pada pendidikan menengah terutama di sekolah-sekolah negeri. Dengan peningkatan yang didominasi oleh perempuan dari keluarga miskin. Penelitian yang menggunakan data survei tingkat rumah tangga ini mengatakan bahwa Uganda adalah negara pertama di Sub-Sahara Afrika yang menerapkan Pendidikan Menengah Universal gratis. Asankha dan Takshi menggunakan banyak data yang dikumpulkan sebelum kebijakan USE dijalankan, untuk kemudian dibandingkan dengan dampak yang dihasilkan pasca pelaksanaan USE pada tahun 2009. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif disimpulkan bahwa

siswa perempuan dari keluarga miskin adalah yang paling banyak mendapatkan manfaat dari kebijakan USE di Uganda. Analisis statistik deskriptif dan dan estimasi ekonometrik menemukan bahwa siswa perempuan memiliki peningkatan akses sebesar 49% pada Sekolah Menengah Negeri namun tidak ada peningkatan signifikan pada siswa laki-laki. Dapat diasumsikan bahwa orang tua mengirim anak perempuan mereka ke sekolah menengah negeri setelah memastikan adanya pendidikan gratis sementara pada Sekolah-sekolah swasta tidak mengalami peningkatan yang signifikan pada pendaftaran. Simpulan akhir dari penelitian ini adalah pemerintah perlu memainkan peran pendidikan menengah universal untuk meningkatkan angka partisipasi kasar.

Hasil penelitian lain dilakukan oleh Ni Wayan Parwati Asih, I Made Yudana dan I Gusti Ketut Arya Sunu pada tahun 2014 tentang efektivitas penggunaan dana BOS pada SMK Teknologi Nasional Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Teknologi Nasional Denpasar dilihat dari variabel Context, Input, Process, dan Product. Hasil analisis data menunjukkan bahwa variabel Context tidak efektif, variabel Input efektif, variabel Process efektif, dan variabel Product efektif. Secara umum berdasarkan analisis CIPP Efektivitas Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Teknologi Nasional Denpasar tergolong efektif. Meskipun

tergolong efektif namun terdapat kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program BOS baik dari variabel Context, Input, Process, dan Product. Untuk itu disarankan: 1) peningkatan pemahaman terhadap kebijakan terkait BOS, tujuan program BOS, 2) peningkatan sumber daya manusia, sosialisai/pelatihan, organisasi/manajemen, dan dana operasional, 3) perencanaan program secara matang, penyaluran dana harus tepat waktu, pemanfaatan dana pada kebutuhan riil, monitoring dan evaluasi dilakukan secara objektif dan berkesinambungan, dan 4) program peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa dirancang sebaik-baiknya.

Hasil penelitian relevan lain yang telah dilakukan oleh I Wayan Cenik, A.A. Gede Agung, I Made Yudana dengan judul efektivitas program BOS dalam mendukung Pendidikan Menengah Universal di SMA Negeri terhadap 153 responden dengan metode CIPP dan dianalisis dengan statistik deskriptif terhadap datanya diperoleh kesimpulan bahwa efektivitas Program BOS dalam mendukung PMU di SMA Negeri Kabupaten Karangasem tergolong cukup efektif dengan kualitas pelaksanaan program cukup. Hasil evaluasi dari penelitian ini perlu dilakukan sosialisasi program yang lebih intensif kepada masyarakat yang menjadi sasaran program BOS, diadakan pelatihan terhadap pengelola BOS.

Penelitian yang sama juga telah dilakukan Direktorat Anggaran Departemen Keuangan dengan judul Efektivitas Dana BOS SMA dengan metode kualitatif deskriptif pada SMA PGRI 3 Bandung dan SMA Negeri 20 Bandung menemukan permasalahan dalam proses penyaluran BOS yang tidak sesuai dengan jadwal yang diatur dalam buku Juknis BOS SMA tahun 2015. Hal ini disebabkan karena kendala dalam pendataan siswa melalui aplikasi Dapodikmen yang tidak lancar karena terkait NISN dan keterlambatan pemindah bukuan dari rekening penampungan ke rekening Sekolah. Sementara itu kebijakan keberpihakan kepada siswa miskin telah dilaksanakan pada kedua sekolah tersebut dengan beberapa perbedaan pada pelaksanaannya. SMA Negeri 20 memberikan pembebasan biaya kepada semua siswa yang masuk kategori miskin yakni sebanyak 154 orang dengan porsi penerima manfaat sebesar 15,67%. Sedangkan SMA PGRI 3 Bandung memberikan keringanan biaya sebesar 25% sd 75% dari iuran sekolah. Simpulan dari penelitian ini penyaluran bos di sekolah terlambat karena adanya pendataan melalui daodikmen tidak lancar karena adanya persepsi yang berbeda. kebijakan keberpihakan pada siswa miskin telak dilaksanakan tetapi potensi siswa miskin hanya mendapatkan keringanan biaya bulanan berupa discount fee, tidak mampu membayar uang spp dikemudian hari sehingga memnungkinkan dropout.

Selain itu juga terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismanto (2014), Manajemen Pendanaan Pendidikan Dalam Wajib Belajar 9 tahun. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sekolah menghadapi hambatan jumlah Sumber Daya Manusia(SDM) karena pada struktur SD/MI Negeri tidak memiliki Kepala Sekolah dan Tata Usaha, Sekolah tidak memiliki SDM yang memiliki kompetensi perencanaan program dan pengelolaan anggaran berbasis APBN/APBD, terbatasnya pemahaman Kepala Sekolah tentang regulasi perencanaan program dan keuangan negara /Daerah, terbatasnya pengalaman Kepala Sekolah dalam manajemen proyek terutama pelaksanaan DAK dan Belum optimalnya koordinasi Dinas Pendidikan dan pemerintah terutama DAK. Ini berarti implementasi manajemen pendanaan di SD Salatiga,Ungaran,Semarang,Demak ,Kendal dan Purwodadi masih mengalami kendala.

Lewin (2008) dalam penelitian tentang strategi pembiayaan di negara-negara sub-sahara Afrika mengatakan bahwa Kesenjangan tingkat partisipasi pada pendidikan menengah meningkat di negara-negara sub-sahara Afrika dan negara berkembang lainnya. Pada tahun 2002 rata-rata angka partisipasi pendidikan menengah di sub-sahara Afrika adalah 25%, jauh dibawah Asia Selatan dan Barat Daya 52%, Timur Tengah dan Afrika Utara 60% Asia Timur dan Pasifik 65% serta



Amerika Latin dan Karibia 83%. Kesenjangan ini memiliki konsekuensi serius bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara-negara Sub-Sahara Afrika. Diperlukan reformasi pendidikan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah Menengah dengan kondisi yang terjangkau oleh masyarakat miskin. Sekolah menengah di negara-negara Sub-Sahara Afrika relatif mahal jika dibandingkan dengan PDB perkapita. Butuh pengembangan efisiensi dan efektivitas agar biaya pendidikan menjadi terjangkau sehingga berpeluang untuk meningkatkan jumlah pendaftaran di sekolah-sekolah menengah.

Penelitian yang dilakukan Asankha dan Takashi menemukan bahwa pendidikan gratis yang ditawarkan pada sekolah negeri efektif meningkatkan partisipasi siswa perempuan dalam pendidikan menengah. Hal ini dipengaruhi latar belakang sosial budaya Uganda yang sangat berbeda dengan sosial budaya Indonesia khususnya Salatiga dalam hal perbedaan gender. Perbedaan lain adalah klasifikasi pembiayaan pendidikan gratis sebagai konsekuensi USE pada sekolah menengah negeri di Uganda berbeda dengan SMKN 1 Salatiga yang merujuk pada upaya memberikan layanan pendidikan berkualitas dengan biaya terjangkau dengan program Bantuan Operasional Sekolah Kejuruan.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian I Wayan Cenik, A.A. Gede Agung, I Made

Yudana dengan judul efektivitas program BOS dalam mendukung Pendidikan Menengah Universal di SMA Negeri Kabupaten Karangasem adalah upaya untuk menggali lebih rinci komponen-komponen yang mempengaruhi pelaksanaan BOS SMK yang tentunya berbeda dengan BOS SMA karena SMK memiliki karakteristik keterampilan dan kompetensi yang lebih spesifik serta berhubungan langsung dengan tingginya kebutuhan tenaga kerja terampil siap pakai pada masa mendatang. Pemahaman yang sama juga membedakan penelitian ini dengan penelitian tentang efektivitas dana BOS SMA pada SMA PGRI 3 dan SMA Negeri 20 Bandung, yang lebih fokus pada sisi manajemen.

Secara substansi Program BOS SMK sebagai sebuah strategi pembiayaan berbeda dengan strategi pembiayaan yang diteliti oleh Lewin (2008) di Negara Negara sub-sahara Afrika walaupun sama-sama bertujuan untuk meningkat APK.

Penelitian Evaluasi Penggunaan Dana BOS di SMKN 1 Salatiga ini menggunakan metode evaluasi CIPP. Metode yang sama juga digunakan dalam penelitian Ni Wayan Parwati Asih, I Made Yudana dan I Gusti Ketut Arya Sunu pada tahun 2014 adalah untuk mengukur efektivitas penggunaan dana BOS pada SMK Teknologi Nasional Denpasar dari variable konteks, input, proses dan produk. Namun penelitian yang dilakukan pada SMKN 1 Salatiga memberikan penekanan lebih pada



kesesuaian antara konteks Program BOS yang terintegrasi dalam kebijakan PMU, tidak hanya untuk memastikan bahwa program BOS SMK telah dilaksanakan dengan baik dari sisi manajemen tetapi juga mengetahui sejauh mana kontribusi Program BOS SMK dalam Kerangka mensukseskan kebijakan PMU.

Penelitian evaluasi terhadap penggunaan Dana BOS DaLam mensukseskan PMU di SMK Negeri 1 Salatigaberupaya menganalisis bagaimana *Context, Input, Process dan Product*.Kelebihan dari penelitian ini adalah peneliti akan mengungkap lebih dalam mengenai faktor penghambat dan faktor pendukung serta berupaya mengidentifikasi dan mengakses dampak/ *outcome* program BOS bagi pihak-pihak yang berkepentingan sehingga dapat memberikan masukan bagi sekolah tentang pelaksanaan Program Dana BOS.

## **2.7 Kerangka Berfikir**

Evaluasi terhadap Program BOS di SMK Negeri 1 Salatiga bertujuan untuk mengukur sejauh mana Kontribusi program BOS dalam mensukseskan Kebijakan Pendidikan Menengah Universal. Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model CIPP. Gambaran mengenai kerangka berfikir penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1. KerangkaBerpikir

